

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kemiskinan merupakan masalah utama yang terus menerus menjadi fokus perhatian pemerintah di berbagai negara, sebab hal tersebut dianggap sebagai indikator kunci untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Kehadiran kemiskinan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, ketidakstabilan sosial-politik, meningkatnya kesenjangan, hingga bertambahnya angka kriminalitas. Penanganan kemiskinan bukan hanya menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga tetap menjadi persoalan yang dihadapi oleh negara-negara maju. (Azizah, Pasaribu, & Irma H, 2024).

Kemiskinan merupakan persoalan yang rumit dan melibatkan banyak dimensi, sebab ia meliputi beragam sisi kehidupan manusia, seperti bidang perekonomian, interaksi sosial, nilai-nilai budaya, serta elemen-elemen tambahan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan. Akibatnya, topik ini menempati posisi sentral dalam rencana pembangunan dan memerlukan pendekatan yang akurat serta efisien untuk diatasi. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menekan angka kemiskinan dengan tujuan mempercepat proses pengentasannya. Indonesia menegaskan nilai penting pembentukan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, seperti yang tercantum dalam pasal keempat Konstitusi 1945. Inisiatif pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan serta standar hidup rakyat secara komprehensif (BPS, 2016).

Dalam kapasitasnya sebagai bangsa sedang berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat secara global, pengurangan tingkat kemiskinan berfungsi sebagai ukuran krusial atas efektivitas pembangunan negara. Meski demikian, hingga kini, sebagian warga masih menghadapi kondisi terbatas, khususnya mereka yang bermukim di wilayah terisolasi atau sulit diakses. Oleh sebab itu, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana suatu kelompok

individu mengalami hambatan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya akibat rendahnya pendapatan dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar (Putra & Khoirudin, 2020).

Berdasarkan BPS (2024), menurut ketetapan pemerintah, garis kemiskinan per kapita di Indonesia adalah Rp582.932 per bulanyang menunjukkan ambang batas pengeluaran minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup. Dari total tersebut, sekitar Rp 433.906 atau setara dengan 74,44% dialokasikan untuk konsumsi makanan, seperti beras, sayur-mayur, protein hewani, dan kebutuhan pangan lainnya, sebesar Rp 149.026 atau sebesar 25,56% dialokasikan untuk memenuhi keperluan selain makanan, yang mencakup sandang, hunian, perawatan kesehatan, serta akses pendidikan.

Data terbaru dari BPS (2025) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan berada pada angka 7,29%, sedangkan di wilayah pedesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 12,22%. Pulau Jawa tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, diikuti oleh Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku-Papua, dan Kalimantan. Di wilayah Sumatera, Provinsi Aceh mencatatkan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2024, yakni sebesar 12,64%. Sebaliknya, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah, yaitu 4,78% pada tahun yang sama.

**Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Pulau Sumatra Menurut Provinsi
Tahun 2020 – 2024 (Persen)**

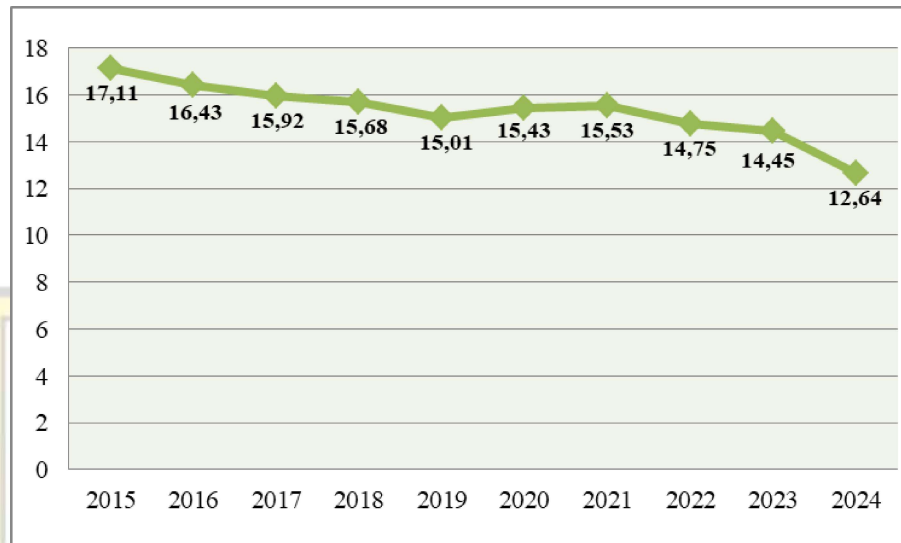
Provinsi	Tahun					Rata-rata Penurunan per tahun(%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Aceh	15,43	15,53	14,75	14,45	12,64	-0,70
Sumatera Utara	9,14	8,49	8,33	8,15	7,19	-0,49
Sumatera Barat	6,56	6,04	6,04	5,95	5,42	-0,29
Riau	7,04	7,00	6,84	6,68	6,36	-0,17
Jambi	7,97	7,67	7,70	7,58	7,26	-0,18
Sumatera Selatan	12,98	12,79	11,95	11,78	10,51	-0,62
Bengkulu	15,3	14,43	14,34	14,04	12,52	-0,69
Lampung	12,76	11,67	11,44	11,11	10,62	-0,54
Kep. Bangka Belitung	4,89	4,67	4,61	4,52	5,08	+0,05
Kep. Riau	6,13	5,75	6,03	5,69	4,78	-0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 1.1 Menggambarkan jumlah penduduk miskin di provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera sepanjang 2020 hingga 2024. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Aceh secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di wilayah tersebut. Rata-rata penurunan tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sumatra selama periode 2020–2024 menunjukkan variasi antar daerah. Provinsi Aceh mencatat rata-rata penurunan sebesar 0,70 poin persentase per tahun, diikuti oleh Provinsi Bengkulu sebesar 0,69 poin persentase per tahun. Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung masing-masing mencatat rata-rata penurunan sebesar 0,62 dan 0,54 poin persentase per tahun.

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 0,49 poin persentase per tahun, sementara Provinsi Kepulauan Riau mencatat penurunan sebesar 0,34 poin persentase per tahun. Penurunan yang lebih rendah terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,29 poin persentase per tahun, diikuti oleh Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang masing-masing mencatat rata-rata penurunan sebesar 0,18 dan 0,17 poin persentase per tahun.

Berbeda dengan provinsi lainnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dengan rata-rata perubahan sebesar 0,05 poin persentase per tahun selama periode pengamatan. Tanda negatif (–) pada nilai rata-rata perubahan menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan tanda positif (+) menunjukkan peningkatan tingkat kemiskinan selama periode 2020–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di Pulau Sumatra belum berjalan merata antar provinsi.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2015 – 2024 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data persentase kemiskinan selama periode 2015–2024, terlihat adanya kecenderungan penurunan dalam jangka panjang, meskipun disertai dengan fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2015, persentase kemiskinan tercatat sebesar 17,11 persen. Angka ini kemudian mengalami penurunan secara bertahap pada periode 2016 hingga 2019, masing-masing menjadi 16,43 persen, 15,92 persen, 15,68 persen, dan 15,01 persen. Penurunan yang relatif konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam periode tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2020 persentase kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi 15,43 persen dan meningkat tipis lagi pada tahun 2021 menjadi 15,53 persen. Kenaikan ini menandai adanya fluktuasi dalam tren penurunan yang sebelumnya terjadi. Selanjutnya, pada periode 2022 hingga 2024, persentase kemiskinan kembali menunjukkan tren menurun, dari 14,75 persen pada tahun 2022 menjadi 14,45 persen pada tahun 2023, dan turun cukup signifikan hingga mencapai 12,64 persen pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, fluktuasi persentase kemiskinan selama periode 2015–2024 ditandai oleh tren penurunan jangka panjang, dengan kenaikan sementara pada tahun 2020 dan 2021. Namun begitu Provinsi Aceh masih pascara konsisten

menempati peringkat teratas sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera, berdasarkan berbagai kajian literatur, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Barro & Martin (2004), mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki implikasi penting bagi kesejahteraan individu, dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berperan dalam menekan tingkat kemiskinan secara global. Hal ini sesuai dengan penelitian Jayadi dan Bata (2016), yang menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan secara substansial.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Yulhendri dan Alisha (2021), yang menyatakan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi turut andil dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya mendorong kenaikan penghasilan kelompok masyarakat miskin dengan kecepatan yang hampir selaras dengan peningkatan pendapatan rata-rata nasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memberikan efek positif langsung dalam mengatasi kemiskinan (Dollar dan Kraay, 2001). Meski demikian, ada kesepakatan umum bahwa pertumbuhan ekonomi tetap merupakan komponen krusial dalam strategi pemberantasan kemiskinan, walaupun bukanlah satu-satunya elemen yang memengaruhi penurunan angka kemiskinan (Gupta & Mitra, 2004)

Tingginya angka pengangguran juga merupakan salah satu aspek yang berdampak pada tingkat kemiskinan daerah. Tingginya angka TPT tidak hanya mencerminkan lemahnya kinerja pasar tenaga kerja, tetapi juga menandakan keterbatasan peluang ekonomi di suatu daerah. Kondisi pengangguran yang tinggi dapat berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kerentanan sosial, serta bertambahnya jumlah rumah tangga miskin (World Bank, 2022). Pertambahan jumlah tenaga kerja baru setiap tahunnya tidak sesuai dengan banyaknya lapangan kerja yang ada. Persoalan ini semakin kompleks karena laju pertumbuhan penduduk yang pesat serta jumlah penduduk yang besar, Banyaknya perusahaan atau industri yang mengalami kebangkrutan mengakibatkan

pemutusan hubungan kerja secara massal. Akibatnya, akan terjadi peningkatan penduduk miskin karena tingginya angka pengangguran (Sukirno, 2019).

Faktor penting lainnya adalah mutu sumber daya manusia yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian IPM yang rendah biasanya mengindikasikan adanya keterbatasan dalam produktivitas tenaga kerja, yang akhirnya dapat memperlambat kemajuan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan berbagai langkah untuk menaikkan mutu sumber daya manusia, yang pada dasarnya dapat dinilai melalui tingkat IPM (Andykha, Handayani, & Woyanti, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran menyeluruh yang dipakai untuk mengevaluasi taraf hidup masyarakat berdasarkan tiga aspek pokok, yakni kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang memadai (*United Nations Development Programme*, 2020).

Peningkatan IPM mencerminkan adanya perbaikan kapasitas dan kualitas manusia yang pada umumnya berkaitan dengan meningkatnya produktivitas individu. Kondisi tersebut dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, apabila peningkatan IPM tidak diikuti oleh kebijakan yang menjamin pemerataan akses terhadap layanan dasar, maka dampak perbaikan IPM terhadap pengurangan kemiskinan dapat menjadi kurang optimal.

Kemiskinan tetap menjadi sebuah persoalan utama yang belum terselesaikan Provinsi Aceh. Mengacu pada data yang dirilis oleh lembaga statistik nasional pada tahun 2024, pada bulan Maret tercatat bahwa sekitar 12,64 persen warga Aceh hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera. Tingginya angka tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh belum bersifat menyeluruh dan belum mampu memberikan dampak positif secara merata bagi seluruh kelompok masyarakat.

Situasi ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap berbagai tolak ukur pembangunan yang diterapkan untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Berdasarkan pertimbangan terhadap tiga faktor utama yang menyebabkan kemiskinan tersebut, maka dibutuhkan kajian mendalam lebih lanjut guna meneliti secara spesifik dampak dari Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, judul penelitian ini ditetapkan sebagai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada pembahasan yang telah diuraikan di bagian latar belakang sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada periode 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2015-2024?
3. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak diperoleh dalam kajian ini mencakup:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2015-2024.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2015-2024.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2015–2024.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan tersedia tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara pertumbuhan

ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2015–2024.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Kajian ini menekankan pada analisis dampak pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Provinsi Aceh dari tahun 2015 hingga 2024, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan karya ini disusun ke dalam lima bab disusun secara sistematis, dengan keterangan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Di bagian pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah yang dijadikan fondasi untuk meneliti topik yang dibahas, termasuk rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, pembatasan studi, dan ikhtisar isi setiap bab dalam penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Di bagian ini, diuraikan teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti, seperti variabel pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan. Selain itu, disampaikan pula tinjauan kajian sebelumnya yang berfungsi sebagai rujukan, serta kerangka berpikir dan penyusunan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Di bagian ini, diuraikan pendekatan dan teknik yang diterapkan dalam penelitian ini, yang mencakup jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi serta sampel yang diteliti, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Di bagian ini, dipaparkan temuan penelitian beserta analisis data yang diperoleh. Hasil tersebut juga dievaluasi melalui perbandingan dengan studi-studi sebelumnya untuk menentukan relevansi dan konsistensinya

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Di bagian penutup, disampaikan ikhtisar temuan penelitian, aspek-aspek penting yang diperoleh, serta rekomendasi atau usulan yang diberikan sesuai dengan kajian yang telah dilaksanakan.

